

DESA PENETAPAN

2018

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 1 TAHUN 2018, LD 2018/NO.1 SETDA KAB.
PURWOREJO 3 HLM

PENETAPAN DESA

- Abstrak : – Pengertian Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Dalam undang-undang tersebut Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut maka desa sebagai wilayah otonom yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan aspirasi masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang dimilikinya. Dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan peraturan daerah tentang penetapan desa;
- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
 - Dalam Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah ini menetapkan 469 (empat ratus enam puluh sembilan) desa di Kabupaten Purworejo, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang nama desa dan kode desa sebagai acuan dalam penyelenggaraan

pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah

- Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Agustus 2018;
- Daftar nama desa dan kode desa yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - Penjelasan 2 Hlm